



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Umum SOPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Visi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau seiring dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Visi Kabupaten Lamandau, yaitu ***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”***.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Kabupaten Lamandau adalah:

- a. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
- c. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.
- d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
- e. Membuka keterisolasian daerah Pedesaan dan Kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
- f. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
- h. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- i. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
- j. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.



1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SOPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut DP3AP2KB Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- k. Pengelolaan kesekretariatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.



1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan SOPD

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA SOPD Tahun Anggaran 2024 serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per 31 Desember 2024.

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan bertujuan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara transparan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, serta menunjukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan bahan dalam membuat keputusan bagi pimpinan serta dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SOPD

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
- p. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024;

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SOPD

Untuk mempermudah proses memahami dan menilai serta mengevaluasi dari laporan ini maka sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini dilakukan sebagai berikut :

- a. Pada Bab I berupa Pendahuluan, menjelaskan tentang :
 - 1.1. Data Umum SOPD
 - 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan SOPD
 - 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SOPD
 - 1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SOPD
 - 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SOPD
- b. Pada Bab II berisi tentang :
 - 2.1. Kebijakan Keuangan
 - 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- c. Pada Bab III berisi tentang Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SOPD terdiri dari:
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SOPD
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target
- d. Pada Bab IV berisi tentang Kebijakan Akuntansi mengenai Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari :
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan SOPD
 - 4.2. Basis Akutansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SOPD
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SOPD



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada SOPD

e. Pada Bab V berisi tentang Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SOPD tentang Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan :

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Belanja

5.1.1.1 Belanja Operasi

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

5.1.1.2. Belanja Modal

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.1.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.1.3. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024

5.2. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.1.1 Aset Lancar

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

5.2.1.1.2 Persediaan

5.2.1.2 Aset Tetap

5.2.1.2.1 Tanah

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

5.2.2. Kewajiban

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.2.3 Ekuitas

5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas

5.3. Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.1.1 Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.3.2 Beban LO

5.3.2.1 Beban Operasi

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.3.2.1.2.1 Beban Persediaan

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan

5.3.2.2 Surplus / Defisit LO

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

f. Pada Bab VI merupakan penutup Catatan atas Laporan Keuangan



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SOPD

2.1. Kebijakan Keuangan

Total Belanja DP3AP2KB Kabupaten Lamandau pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 9.196.878.576,- mengalami kenaikan sebesar Rp 422.968.736,- atau 4,6 % dari belanja APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.773.909.842,-. Belanja DP3AP2KB Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.367.510.471,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.829.368.105,-.

2.1.1. Belanja Daerah

Belanja Daerah yang dikelola melalui DPA dan DPPA pada DP3AP2KB Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp 9.196.878.576,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp 3.367.510.471,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 5.272.418.105,-
- c. Belanja Modal sebesar Rp 556.950.000,-.

2.2. Pencapaian Target Kinerja SOPD

Dalam DPA dan DPPA DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 terdapat 21 (dua puluh satu) Program yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 70.759.700,- Atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 70.869.747,-
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terealisasi sebesar Rp. 3.321.597.083,- atau 99 % dari anggaran sebesar Rp. 3.359.350.471,-
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, terealisasi sebesar Rp. 788.696.163,- atau 96 % dari anggaran sebesar Rp. 828.958.644,-.



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

3. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Belanja Bimbingan Teknis terealisasi sebesar Rp. 14.947.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sebesar Rp. 9.800.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 9.800.000,-
 - b. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan terealisasi sebesar Rp. 31.001.500,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 31.027.500,-
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar Rp. 9.240.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 9.240.000,-
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp. 313.104.366,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 313.355.525,-
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp. 165.795.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 165.810.000,-
5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terealisasi sebesar Rp. 54.343.454,- atau 91 % dari anggaran sebesar Rp. 59.930.000,-
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-
6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terealisasi sebesar Rp. 69.565.600,- atau 94 % dari anggaran sebesar Rp. 74.290.000,-
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi sebesar Rp. 247.700.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 247.704.000,-
7. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- a. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG sebesar Rp. 24.974.465,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-.
8. Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi terealisasi sebesar Rp. 433.368.824,- atau 98 % dari anggaran sebesar Rp. 441.906.000,-.
9. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota sebesar Rp. 28.797.600,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 29.000.000,-.
 - b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 29.719.257,- atau 98 % dari anggaran sebesar Rp. 30.333.333,-
10. Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 26.277.000,- atau 99 % dari anggaran sebesar Rp. 26.666.667,-.
11. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp. 19.567.000 atau 98 % dari anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- a. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 97.805.875,- atau 98 % dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
13. Program Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 18.619.500,- atau 93 % dari anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-.
14. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 177.656.890,- atau 99 % dari anggaran sebesar Rp. 180.758.046,-.
15. Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
- a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 23.653.100,- atau 77 % dari anggaran sebesar Rp. 31.000.000,-.
16. Program Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp. 24.451.400,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 24.489.250,-.
17. Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana terealisasi sebesar Rp. 65.980.540,- atau 99 % dari anggaran sebesar Rp. 66.821.000,-.
-



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

18. Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB terealisasi sebesar Rp. 2.210.923.424,- atau 77 % dari anggaran sebesar Rp. 2.904.398.000,-.
19. Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terealisasi sebesar Rp. 39.535.393,- atau 99 % dari anggaran sebesar Rp. 39.535.393.000,-.
 - b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya terealisasi sebesar Rp. 19.967.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 20.021.000,-.
20. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB terealisasi sebesar Rp. 9.728.000,- atau 98 % dari anggaran sebesar Rp. 9.943.000,-.
21. Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan terealisasi sebesar Rp. 36.861.600,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 37.171.000,-.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SOPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SOPD

3.1.1. Belanja

Total realisasi Belanja pada DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 8.388.458.241,- atau 91,21 % dari pagu belanja sebesar Rp. 9.196.878.576,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
Total realisasi belanja tidak langsung berupa belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil adalah sebesar Rp. 3.329.757.083,- atau 98,88 % dari pagu sebesar Rp. 3.367.510.471,-
- b. Belanja Langsung
Total realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 5.058.701.158,- atau 87 % dari pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.829.368.105,-.
Rinciannya sebagai berikut :
 - 1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 4.503.681.158,-atau 85,42 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.272.418.105,-.
 - 2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. 555.020.000,- atau 99,65 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 556.950.000,-.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

- 1. DAK Non Fisik BOKB
 - a. Kendala terdapat pada menu Operasional Penurunan Stunting pada Sub Menu Operasional pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Beresiko, dan Balita Stunting dan Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting. Kedua sub menu tersebut merupakan honor bagi pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di semua Desa di Kabupaten Lamandau. Karena pelaporan se Kabupaten Lamandau dilakukan secara online dan jaringan internet belum merata sehingga pembayaran belum maksimal.
 - b. Sub Menu Audit Stunting dan Koordinasi Tingkat Kabupaten, kedua menu ini sudah dilaksanakan namun memiliki sisa anggaran yang banyak karena alokasi yang terlalu besar. Realisasi fisik telah 100 % namun dalam realisasi keuangan tidak mencapai 100 %.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tahun 2024 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah.

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan SOPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006, pengelolaan Keuangan SOPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing SOPD. Sesuai dengan fungsi tersebut DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sebagai SOPD berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan SOPD DP3AP2KB Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SOPD

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau adalah basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan



budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana di neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SOPD

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

c. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.



e. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

f. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengasongan dan pembongkaran bangunan lama.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada SOPD

Secara umum kebijakan akuntansi menerapkan SAP berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan keuangan. Basis akrual dalam neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	9.196.878.576,00	8.388.458.241,00	7.443.643.214,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 8.388.458.241,00 dan Rp. 7.443.643.214,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	8.639.928.576,00	7.833.438.241,00	90,67	6.857.825.214,00
Belanja Modal	556.950.000,00	555.020.000,00	99,65	585.818.000,00
Jumlah	9.196.878.576,00	8.388.458.241,00	91,21	7.443.643.214,00

5.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Operasi	8.639.928.576,00	7.833.438.241,00	6.857.825.214,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.833.438.241,00 dan Rp. 6.857.825.214,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	3.367.510.471,00	3.329.757.083,00	98,88	3.161.520.275,00
Belanja Barang dan Jasa	5.727.418.105,00	4.503.681.158,00	85,42	3.696.304.939,00
Jumlah	8.639.928.576,00	7.833.438.241,00	90,67	6.857.825.214,00

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Pegawai	3.367.510.471,00	3.329.757.083,00	3.161.520.275,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 3.329.757.083,00 dan Rp. 3.161.520.275,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	1.410.406.323,00	1.139.477.300,00	99,59	1.344.309.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.317.499,00	110.137.848,00	98,06	107.757.414,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	195.209.125,00	192.130.000,00	98,42	192.725.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.279.125,00	17.990.000,00	98,42	15.445.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	67.106.183,00	65.612.520,00	97,77	66.771.240,00



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	70.858.286,00	66.229.752,00	93,47	66.039.193,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.176,00	19.622,00	97,25	23.145,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.485.153.754,00	1.479.000.041,00	99,59	1.360.290.283,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
Jumlah	3.367.510.471,00	3.329.757.083,00	98,88	3.161.520.275,00

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja pegawai tercapai maksimal di tahun 2024 disebabkan adanya pph final pada belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dengan nilai cukup besar yang harus dibayarkan.

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	5.272.418.105,00	4.503.681.158,00	3.696.304.939,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 4.503.681.158,00, dan Rp. 3.696.304.939,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Per Akun

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	106.748.000,00	102.333.000,00	95,86	2.185.000,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	79.185.098,00	78.849.700,00	99,58	52.687.000,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	123.040.314,00	121.453.300,00	98,71	104.149.250,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.180.000,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.000.000,00	46.995.000,00	100,00	0,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	4.957.513,00	4.950.000,00	82,86	7.280.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.978.603,00	161.218.500,00	88,59	181.361.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.000.000,00	16.960.000,00	36,09	175.430.000,00
Belanja Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.350.000,00	199.500.000,00	79,69	97.950.000,00
Belanja Honorarium Penyuluhan atau	945.418.000,00	690.304.300,00	73,02	780.894.800,00



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Pendampingan				
Belanja Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	845.000,00	845.000,00	100,00	1.000.000,00
Belanja Sewa Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	500.000,00	405.000,00	81,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	749.304.000,00	709.940.491,00	94,75	705.463.964,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	102.956.000,00	85.082.440,00	82,64	113.092.973,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Air	9.442.000,00	8.565.490,00	90,72	3.105.900,00
Belanja Tagihan Listrik	54.222.450,00	40.357.964,00	74,43	38.550.834,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00	9.240.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	57.765.550,00	19.265.500,00	33,35	26.009.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.300.000,00	6.765.600,00	59,87	9.529.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	52.586.520,00	51.837.665,00	98,58	49.718.364,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	4.112.124,00	3.962.007,00	96,35	3.568.378,00
Belanja Sosialisasi	794.660.000,00	586.100.000,00	73,75	244.275.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.990.000,00	48.800.000,00	100,00	30.990.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.600.000,00	0,00	0	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.220.000,00	3.220.000,00	100,00	1.220.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit – Personal Computer	4.234.000,00	4.230.000,00	100,00	1.460.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat	10.764.945,00	8.127.969,00	75,50	26.014.287,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.200.000,00	42.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	28.900.000,00	28.900.000,00	100,00	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	14.947.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	735.988.215,00	731.076.732,00	99,33	417.538.189,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	585.159.773,00	520.628.500,00	88,97	552.332.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.000.000,00	14.870.000,00	99,13	10.779.100,00
Jumlah	5.272.418.105,00	4.503.681.158,00	85,42	3.696.304.939,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:



- a. Belanja barang dan jasa pada DAK Non Fisik BOKB terdapat honor penyuluhan dan pendampingan Penurunan Stunting pada sub menu operasional pendampingan sasaran catin, keluarga beresiko, dan balita stunting dan operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di semua Desa di Kabupaten Lamandau yang dilakukan secara online sedangkan jaringan internet belum merata di semua wilayah sehingga mengakibatkan penyerapan belanja barang dan jasa tidak maksimal.
- b. Besarnya alokasi penganggaran belanja barang dan jasa sub menu Audit Stunting dan Koordinasi Tingkat Kabupaten pada DAK Non Fisik BOKB yang pada kenyataannya kegiatan tersebut telah secara maksimal dilaksanakan.

5.1.1.2 Belanja Modal

Belanja	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Modal	556.950.000,00	555.020.000,00	585.818.000,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.950.000,00	555.020.000,00	99,65	349.200.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	236.618.000,00
Jumlah	556.950.000,00	555.020.000,00	99,65	585.818.000,00

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Peralatan dan Mesin	556.950.000,00	555.020.000,00	349.200.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 555.020.000,00 dan Rp. 349.200.000,00.



Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pendingin	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Dapur	1.000.000,00	990.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	50.250.000,00	50.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	300.000.000,00	298.080.000,00	100,00	232.800.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	116.400.000,00
Jumlah	556.950.000,00	555.020.000,00	99,65	349.200.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun anggaran 2024 terealisasi secara maksimal nilai belanja lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	0,00	0,00	236.618.000,00

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 236.618.000,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	236.618.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	236.618.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut :



- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun anggaran 2024 tidak terdapat terealisasi karena tidak adanya penganggaran untuk belanja gedung dan bangunan.

5.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan nggaran (SiLPA)	Anggaran (9.196.878.576,00)	Realisasi 2024 (8.388.458.241,00)	Realisasi 2023 (7.443.643.214,00)
---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

5.1.3 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 sebesar (Rp. 8.388.458.241,00)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp. 7.288.518.159,62 Kewajiban sebesar Rp. 111.165.432,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 7.716.343.207,62

5.2.1 Aset

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	7.288.518.159,62	7.822.992.861,62

Total saldo Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.288.518.159,62 atau turun sebesar Rp. 534.474.702,00 dari tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	134.708.394,00	88.278.240,00	52,60	46.430.154,00
Aset Tetap	7.153.809.765,62	7.734.714.621,62	(7,51)	(580.904.856,00)
Jumlah	7.288.518.159,62	7.822.992.861,62	(6,83)	(534.474.702,00)

5.2.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	134.708.39400	88.278.240,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 134.708.394,00 atau naik sebesar Rp. 46.430.154,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp Rp. 88.278.240,00 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	5.827.000,00	7.724.750,00	(24,57)	(1.897.750,00)
Persediaan	128.881.394,00	80.553.490,00	59,99	48.327.904,00
Jumlah	134.708.394,00	88.278.240,00	52,60	46.430.154,00

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Dibayar Dimuka	5.827.000,00	7.724.750,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.827.000,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.724.750,00

Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2024	saldo 31 Des 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Dibayar Dimuka	5.827.000,00	7.724.750,00	(24,57)	(1.897.750,00)
Jumlah	5.827.000,00	7.724.750,00	(24,57)	(1.897.750,00)

Adapun rincian sebagai berikut :

Beban Dibayar Dimuka

Uraian	Saldo 31 Des 2024	saldo 31 Des 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	5.827.000,00	7.724.750,00	(24,57)	(1.897.750,00)
- Mobil KH 8172 RW	1.095.875,00	1.246.250,00	(12,07)	(150.375,00)
- Mobil KH 7004 RU	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sepeda Motor KH 4923 RY	93.333,33	100.000,00	(6,67)	(6.666,67)
- Sepeda Motor KH 4926 RY	151.000,00	127.916,67	18,05	23.083,33
- Sepeda Motor KH 4924 RY	151.000,00	127.916,27	18,05	23.083,33
- Sepeda Motor KH 4644 RY	29.125,00	94.250,00	(69,10)	(65.125,00)
- Sepeda Motor KH 4927 RY	0,00	127.916,67	(100,00)	(127.916,67)
- Sepeda Motor KH 4928 RY	93.333,33	100.000,00	(6,67)	(6.666,67)
- Sepeda Motor KH 4862 RY	0,00	43.333,33	(100,00)	(43.333,33)
- Sepeda Motor KH 4925 RY	121.250,00	127.916,67	(5,21)	(6.666,67)
- Sepeda Motor KH 4155 RY	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sepeda Motor KH 4337 RY	0,00	174.166,67	(100,00)	(174.166,67)
- Sepeda Motor KH 4351 RY	0,00	74.708,33	(100,00)	(74.708,33)
- Sepeda Motor KH 4343 RY	0,00	79.291,67	(100,00)	(79.291,67)
- Sepeda Motor KH 4348 RY	241.500,00	74.708,33	223,26	166.791,67
- Sepeda Motor KH 4344 RY	245.116,67	74.708,33	228,10	170.408,34
- Sepeda Motor KH 4350 RY	0,00	74.708,33	(100,00)	(74.708,33)
- Sepeda Motor KH 4342 RY	0,00	79.291,67	(100,00)	(79.291,67)
- Sepeda Motor KH 4346 RY	0,00	79.291,67	(100,00)	(79.291,67)
- Sepeda Motor KH 4345 RY	245.116,67	79.291,67	209,13	165.825,00
- Mobil KH 1583 RU	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
- Mobil KH 7007 RU	0,00	1.043.166,67	(100,00)	(1.043.166,67)
- Sepeda Motor KH 4522 RY	0,00	82.500,00	(100,00)	(82.500,00)
- Sepeda Motor KH 4523 RY	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sepeda Motor KH 4069 RY	0,00	81.500,00	(100,00)	(81.500,00)
- Sepeda Motor KH 4073 RY	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mobil KH 8197 RW	1.982.200,00	1.912.100,00	3,67	70.100,00



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- Sepeda Motor KH 4339 RY	0,00	174.166,67	(100,00)	(174.166,67)
- Mobil KH 1520 RU	585.150,00	752.650,00	(22,25)	(167.500,00)
Jumlah	5.827.000,00	7.724.750,00	(24,57)	(1.897.750,00)

5.2.1.1.2 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	128.881.394,00	80.553.490,00

Saldo persediaan sebesar Rp. 128.881.394,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2024 dan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 80.553.490,00.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tabel Laporan Persediaan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2023		80.553.490,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		80.553.490,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2024	668.237.469,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Reklas dari Aset Tetap (Mesin Cuci Mobil)	2.000.000,00	
8	Reklas dari Aset Tetap (Kep Semprot)	1.000.000,00	
9	Reklas dari Aset Tetap (Tempat Sampah Tertutup)	990.000,00	
10	Reklas dari Aset Tetap (Kipas Angin)	2.700.000,00	
11	Reklas dari Aset Tetap (BKB KIT Stunting)	298.080.000,00	
12	Penerimaan hibah persediaan	344.077.563,00	
13	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8+9+10+11+12)	1.317.085.032,00	
14	Dikurangi:		
15	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2024	(,00)	
16	Pengeluaran hibah persediaan	(,00)	
17	Jumlah tambahan persediaan bersih (15+16)	(,00)	
18	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+13+17)		1.397.638.522,00
19	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(1.268.757.128,00)
20	Persediaan tahun 2024 (18+19)		128.881.394,00

Persediaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	naik / turun	
			%	(Rp)
Obat	128.881.394,00	80.553.490,00	59,99	48.327.904,00
Jumlah	128.881.394,00	80.553.490,00	59,99	48.327.904,00



5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tetap	7.153.809.765,62	7.734.714.621,62

Saldo Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.153.809.765,62 mengalami penurunan sebesar Rp. 580.904.856,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	332.432.147,00	332.432.147,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.443.397.323,00	7.193.147.323,00	3,48	250.250.000,00
Gedung dan Bangunan	9.195.706.549,62	9.195.706.549,62	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.019.045,00	122.019.045,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.939.745.299,00)	(9.108.590.443,00)	9,12	(831.154.856,00)
Jumlah	7.153.809.765,62	7.734.714.621,62	(7,51)	(580.904.856,00)

Saldo Awal 1 Januari 2024 7.734.714.621,62

Penambahan :

• Belanja Modal 2024	555.020.000,00
• Koreksi Pencatatan aset tetap	0,00
• Mutasi masuk dari SOPD	0,00
• Reklas dari belanja barang dan jasa	0,00
• Pembelian dari Dana BOS/BLUD	0,00
• Penambahan bukan pengadaan (Hibah)	0,00
• Reklas aset tetap di skpd	0,00

Jumlah Penambahan 555.020.000,00

Pengurangan :

• Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	0,00
• Reklas keluar ke ekstrakom	0,00
• Beban penyusutan	831.154.856,00
• Mutasi keluar ke SOPD lain	0,00
• Reklas aset tetap dan aset lainnya	304.770.000,00
• Penghapusan Aset Tetap dan Sapi karena terjual/mati	0,00
• Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu mobil)	0,00
• Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00

Jumlah Pengurangan 1.135.924.856,00
Jumlah (1+2-3) 7.153.809.75,62



Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	332.432.147,00	332.432.147,00

Saldo Aset Tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 332.432.147,00 tidak mengalami penurunan dan kenaikan atau tetap sebesar Rp. 332.432.147,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	332.432.147,00	0,00	0,00	332.432.147,00	0,00
Jumlah	332.432.147,00	0,00	0,00	332.432.147,00	0,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	7.443.397.323,00	7.193.147.323,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.443.397.323,00. Pada aset tetap peralatan dan mesin terjadi reklas ke persediaan (bahan-bahan lainnya) sebesar Rp 304.770.000,00 tetapi aset tetap peralatan dan mesin mengalami peningkatan karena tidak semua aset tetap peralatan dan mesin terjadi reklas, kenaikan aset tersebut sebesar Rp. 250.250.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	7.193.147.323,00	304.770.000,00	555.020.000,00	7.443.397.323,00	0,00
Jumlah	7.193.147.323,00	304.770.000,00	250.250.000,00	7.443.397.323,00	0,00

Penambahan dan pengurangan sebesar, Rp. 859.790.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2024	7.193.147.323,00
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2024 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	555.020.000,00



Jumlah Penambahan	555.020.000,00
Pengurangan :	
• Mutasi keluar dari SOPD	(0,00)
• Reklas ke Barang Jasa	(0,00)
• Reklas ke Gedung dan Bangunan	(0,00)
• Reklas ke Aset lainnya (rusak berat)	(0,00)
• Reklas keluar ke ekstrakompentable	(0,00)
• Reklas keluar ke persediaan (bahan-bahan lainnya)	(304.770.000,00)
Jumlah Pengurangan	(304.770.000,00)
Jumlah (1+2+3)	7.443.397.323,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Gedung dan Bangunan	9.195.706.549,62	9.195.706.549,62

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9.195.706.549,62, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dibandingkan saldo tahun sebelumnya tetap sebesar Rp. 9.195.706.549,62.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	9.195.706.549,62	0,00	0,00	9.195.706.549,62	0,00
Jumlah	9.195.706.549,62	0,00	0,00	9.195.706.549,62	0,00

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.019.045,00	122.019.045,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 122.019.045,00 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, tetap sebesar Rp. 122.019.045,00, dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan	122.019.045,00	0,00	0,00	122.019.045,00	0,00



Jaringan					
Jumlah	122.019.045,00	0,00	0,00	122.019.045,00	0,00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan	(9.939.745.299,00)	(9.108.590.443,00)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp. 9.939.745.299,00) mengalami peningkatan sebesar Rp. (831.154.856,00,) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024		Saldo per 31/12/2024	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	(9.108.590.443,00)	0,00	(831.154.856,00)	(9.939.745.299,00)	(831.154.856,00)
Jumlah	(9.108.590.443,00)	0,00	(831.154.856,00)	(9.939.745.299,00)	(831.154.856,00)

Penambahan sebesar (Rp. 831.154.856,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(9.108.590.443,00)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(385.178.905,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(436.510.471,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(9.465.480,00)
Jumlah Penambahan	(831.154.856,00)
Pengurangan :	
• Penghapusan	(0,00)
• Koreksi Salah Saji	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	(9.939.745.299,00)

5.2.1.3 Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lainnya	0,00	0,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp 0,00, terdiri atas Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aet Lainnya. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya sebelum sebesar Rp. 0,00 tidak terjadi perubahan yaitu sebesar Rp. 0,00 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:



Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(115.000.000,00)	(115.000.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain	115.000.000,00	115.000.000,00

Akun ini berisi barang yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat. Saldo per 31 desember 2024 sebesar Rp. 115.000.000,00 tidak mengaami perubahan, sama seperti di tahun 2023 sebesar Rp. 115.000.000,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2024	Saldo per 31/12/2023
Aset Rusak Berat/Usang	115.000.000,00	115.000.000,00
Jumlah	115.000.000,00	115.000.000,00

5.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(115.000.000,00)	(115.000.000,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 115.000.000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 115.000.000,00.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lainnya	(115.000.000,00)	(115.000.000,00)	0,00	(0,00)
Jumlah	(115.000.000,00)	(115.000.000,00)	0,00	(0,00)

Berikut Rincian Aset Lainnya:

Uraian	Saldo per 31/12/2024	Saldo per 31/12/2023
Aset Rusak Berat/Usang	(115.000.000,00)	(115.000.000,00)
Jumlah	(115.000.000,00)	(115.000.000,00)



5.2.2 Kewajiban

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban	111.165.432,00	106.649.654,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2024 sebesar Rp. 111.165.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.515.778,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	111.165.432,00	106.649.654,00	4,23	4.515.778,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	111.165.432,00	106.649.654,00	4,23	4.515.778,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban Jangka Pendek	111.165.432,00	106.649.654,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2024 sebesar Rp. 111.165.432,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.515.778,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Belanja	111.165.432,00	106.649.654,00	4,32	4.515.778,00
Jumlah	111.165.432,00	106.649.654,00	4,32	4.515.778,00

Rincian Utang Belanja sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023
Utang Belanja Pegawai : - Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2024	111.165.432,00	106.649.654,00
Jumlah	111.165.432,00	106.649.654,00

5.2.3 Ekuitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas	7.177.352.727,62	7.716.343.207,62

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.177.352.727,62 mengalami penurunan sebesar Rp. 538.910.480,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	7.177.352.727,62	7.716.343.207,62	(6,98)	(538.910.480,00)
Jumlah	7.177.352.727,62	7.716.343.207,62	(6,98)	(538.910.480,00)



5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban dan Ekuitas	7.288.518.159,62	7.822.992.861,62

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.288.518.159,62 mengalami Penurunan sebesar Rp. 534.474.702,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	7.288.518.159,62	7.822.992.861,62	(6,83)	(534.474.702,00)
Jumlah	7.288.518.159,62	7.822.992.861,62	(6,83)	(534.474.702,00)

5.3 Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- 1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak DP3AP2KB dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Uraian	2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	344.077.563,00	186.759.346,00	157.318.217,00	84,24
Pendapatan Hibah	344.077.563,00	186.759.346,00	157.318.217,00	84,24
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 344.077.563,00 dan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 186.759.346,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Hibah	344.077.563,00	186.759.346,00
Jumlah	344.077.563,00	186.759.346,00

Pendapatan Hibah

Realiasi Pendapatan Hibah untuk periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 344.077.563,00, dan untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 186.759.346,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	344.077.563,00	186.759.346,00
Jumlah	344.077.563,00	186.759.346,00



Penjelasan :

- Perubahan nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Droping Hibah Alokasi dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditahun 2024 lebih besar nilainya dibanding dengan tahun 2023, sehingga terjadi kenaikan nilai dibanding dengan tahun 2023.
- Pengakuan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp. 344.077.563,00. (Rp. 344.077.563,00 – Rp. 0,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/ atau pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		344.077.563,00
Penjelasan Selisih:		
❖ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
➢ Pendapatan Hibah Obat-obatan Tahun 2024	344.077.563,00	
❖ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
➢	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		344.077.563,00

5.3.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2024 sebesar Rp. 9.271.526.284 tahun 2023 sebesar Rp. 8.244.960.443,33 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Beban Pegawai	3.334.272.861,00	3.151.275.149,00
Beban Persediaan	1.268.757.128,00	1.085.119.570,00
Beban Jasa	2.514.516.207,00	2.121.456.896,33
Beban Pemeliharaan	56.250.000,00	33.670.000,00
Beban Perjalanan Dinas	1.266.575.232,00	980.649.789,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	385.178.905,00	434.601.820,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	436.510.471,00	428.623.204,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.465.480,00	9.564.015,00
Jumlah	9.271.526.284,00	8.244.960.443,33



5.3.2.1 **Beban Operasi**

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2024. Beban Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.271.526.284,00 dan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 8.244.960.443,33, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Beban Pegawai	3.334.272.861,00	3.151.275.149,00
Beban Persediaan	1.268.757.128,00	1.085.119.570,00
Beban jasa	2.514.516.207,00	2.121.456.896,33
Beban Pemeliharaan	56.250.000,00	33.670.000,00
Beban Perjalanan Dinas	1.266.575.232,00	980.649.789,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	385.178.905,00	434.601.820,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	436.510.471,00	428.623.204,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.465.480,00	9.564.015,00
Jumlah	9.271.526.284,00	8.244.960.443,33

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 3.334.272.861,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 182.997.712,00 atau 6 % bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 3.151.275.149,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.

Rincian Beban Pegawai tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2024	saldo 31 Des 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.390.477.300,00	1.344.309.000,00	46.168.300,00	3,43
Beban Tunjangan Keluarga PNS	110.137.848,00	107.757.414,00	2.380.434,00	2,21
Beban Tunjangan Jabatan PNS	192.130.000,00	192.725.000,00	(595.000,00)	(0,31)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.990.000,00	15.445.000,00	2.545.000,00	16,48
Beban Tunjangan Beras PNS	65.612.520,00	66.771.240,00	(1.158.720,00)	(1,74)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	66.229.752,00	66.039.193,00	190.559,00	0,29
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.622,00	23.145,00	(3.523,00)	(15,22)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.483.515.819,00	1.350.045.157,00	133.470.662,00	9,89
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Jumlah	3.334.272.861,00	3.151.275.149,00	182.997.712,00	6,00



Penjelasan:

- 1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya kekosongan Kepala Dinas yang dijabat oleh Plt. Kepala Dinas yang kemudian terisi sehingga menyebabkan penyerapan belanja gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai di Tahun Anggaran 2024 lebih besar dibanding tahun 2023
- 2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 4.515.778,00 (Rp. 3.334.272.861,00 – Rp. 3.329.757.083,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		4.515.778,00
Penjelasan Selisih:		
❖ Penambahan Beban LO:		
➢ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023	106.649.654,00	
❖ Pengurangan Beban LO:		
➢ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2024	111.165.432,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		4.515..778,00

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk POS Beban Barang dan Jasa tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui DP3AP2KB selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut :

Uraian	saldo 31 Des 2024	saldo 31 Des 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Persediaan	1.268.757.128,00	1.085.119.570,00	183.637.558,00	17,00
Beban Jasa	2.514.516.207,00	2.121.456.896,33	393.059.310,67	19,00
Beban Pemeliharaan	56.250.000,00	33.670.000,00	22.580.000,00	67,00
Beban Perjalanan Dinas	1.266.575.232,00	980.649.789,00	285.925.443,00	30,00
Jumlah	5.106.098.567,00	4.220.896.255,33	885.202.311,67	20,97



Penjelasan :

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut :
 - a. Adanya reklas peralatan dan mesin berupa sarana prasarana percepatan penurunan stunting (alat peraga BKB KIT stunting), mesin cuci mobil, kep semprot, tempat sampah dan kipas angin ke beban bahan-bahan lainnya yang bersumber DAK BOKB dan APBD tahun 2024 sehingga beban persediaan ditahun 2024 lebih besar dibanding tahun 2023.
 - b. Adanya alokasi anggaran DAK BOKB di tahun 2024 yang cukup besar pada Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sehingga beban Jasa ditahun 2024 lebih besar dibanding tahun 2023.
 - c. Adanya penambahan anggaran perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota di tahun 2024 sehingga beban perjalanan dinas di tahun 2024 lebih besar dibanding dengan tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Barang dan Jasa dalam LRA tahun 2024 sebesar Rp. 602.417.409,00 (Rp. 5.106.098.567,00 – Rp. 4.503.681.158,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO - LRA		602.417.409,00
Penjelasan Selisih:		
❖ Penambahan Beban LO:		
➤ Reklas Peralatan dan Mesin berupa Mesin Cuci Mobil ke Beban Bahan- bahan Lainnya	2.000.000,00	
➤ Reklas Peralatan dan Mesin berupa Kep Semprot ke Beban Bahan – bahan Lainnya	1.000.000,00	
➤ Reklas Peralatan dan Mesin berupa Tempat Sampah Tertutup ke Beban Bahan – bahan Lainnya	990.000,00	
➤ Reklas Peralatan dan Mesin berupa Kipas Angin ke Beban Bahan – bahan Lainnya	2.700.000,00	
➤ Reklas Peralatan dan Mesin berupa BKB KIT Stunting ke Beban Bahan – bahan Lainnya	298.080.000,00	
➤ Beban Obat - obatan	295.749.659,00	
➤ Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023	7.724.750,00	
❖ Pengurangan Beban LO:		
➤ Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	5.827.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		602.417.409,00



5.3.2.1.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.268.757.128,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 183.637.558,00 atau 17,00 % bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2023 sebesar Rp. 1.085.119.570,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	407.103.000,00	351.385.000,00	55.718.000,00	15,86
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.849.700,00	52.687.000,00	26.162.700,00	49,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.453.300,00	104.149.250,00	17.304.050,00	16,61
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.000.000,00	2.180.000,00	820.000,00	37,61
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.245.000,00	0,00	49.245.000,00	0,00
Beban Obat-Obatan-Obat	300.699.659,00	181.613.033,00	119.086.626	65,57
Beban Makanan dan Minuman Rapat	161.218.500,00	181.361.000,00	(20.142.500,00)	(11,11)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.960.000,00	175.430.000,00	(158.470.000,00)	(90,33)
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat	8.127.969,00	26.014.287,00	(17.886.318,00)	(68,76)
Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Pendukung Olah Raga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	28.900.000,00	0,00	28.900.000,00	0,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Jumlah	1.268.757.128,00	1.085.119.570,00	183.637.558,00	17,00

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.514.516.207,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 393.059.310,67 atau 19,00 % bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2023 sebesar Rp. 2.121.456.896,33 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	199.500.000,00	97.950.000,00	101.550.000,00	103,68



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	690.304.300,00	780.894.800,00	(90.590.500,00)	(11,60)
Beban Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36.000.000,00	5.000.000,00	31.000.000,00	620,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	709.940.491,00	705.463.964,00	4.476.527,00	0,68
Beban Jasa Tenaga Keamanan	85.082.440,00	113.092.973,00	(28.010.553,00)	(24,77)
Beban Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	8.565.490,00	3.105.900,00	5.459.590,00	175,78
Beban Tagihan Listrik	40.357.964,00	38.550.834,00	1.807.130,00	4,69
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.265.500,00	26.009.000,00	(6.743.500,00)	(25,93)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.663.350,00	10.587.638,33	(1.924.333,33)	(18,18)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.837.665,00	49.718.364,00	2.119.301,00	4,26
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.962.007,00	3.568.378,00	393.629,00	11,03
Beban Sewa Mebel	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	13,33
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	845.000,00	1.000.000,00	(155.000,00)	(15,50)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Beban Sewa Taman	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Beban Sosialisasi	586.100.000,00	244.275.000,00	341.825.000,00	139,93
Beban Bimbingan Teknis	14.947.000,00	0,00	14.947.000,00	0,00
Jumlah	2.514.516.207,00	2.121.456.896,33	393.059.310,67	19,00

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 56.250.000,00 dan keniakan sebesar Rp. 22.580.000,00 atau 67,06 % bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp. 33.670.000,00.

Rincian Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.230.000,00	1.460.000,00	2.770.000,00	189,73
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.220.000,00	1.220.000,00	2.000.000,00	163,93
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.80.000,00	30.990.000,00	17.810.000,00	57,47
Jumlah	56.250.000,00	33.670.000,00	22.580.000,00	67,06



5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 1.266.575.232,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 285.925.443,00 atau 29,15 % bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp. 980.649.789,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	520.628.500,00	552.332.500,00	(31.704.000)	(5,74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.870.000,00	10.779.100,00	4.090.900,00	37,95
Beban Perjalanan Dinas Biasa	731.076.732,00	417.538.189,00	313.538.543.00	75,09
Jumlah	1.266.575.232,00	980.649.789,00	285.925.443,00	29,15

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2024 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2024 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp. 831.154.856,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 41.634.183,00 atau 4,77 % bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp. 872.789.039,00. Rincian Beban Penyusutan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2024	saldo 31 Des 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	385.178.905.00	434.601.820.00	(49.422.915,00)	(11,37)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	436.510.471.00	428.623.204.00	7.887.267,00	1,84
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.465.480.00	9,564,015.00	(98.535,00)	(1,03)
Jumlah	831.154.856.00	872.789.039.00	(41.634.183.00)	(4,77)

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan tahun 2024 dari tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut :
 - a. Terjadi penurunan beban penyusutan di tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 disebabkan adanya tidak adanya penambahan aset yang signifikan di tahun 2024.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dalam LO tahun 2024 dengan tahun 2023 telah diungkapkan dalam Calk terkait penjelasan atas Pos-Pos Neraca.



5.3.2.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	344.077.563,00	186.759.346,00	157.318.217,00	84,24
Beban	9.271.526.284,00	8.244.960.443,33	1.026.565.840,67	12,45
Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(8.927.448.721,00)	(8.058.201.097,33)	(869.247.623,67)	10,79

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.716.343.207,62	8.330.901.090,95
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.927.448.721)	(8.058.201.097,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.388.458.241,00	7.443.643.214,00
EKUITAS AKHIR	7.177.352.727,62	7.716.343.207,62

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2023 senilai Rp. 7.716.343.207,62;



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

2. Surplus/Defisit – LO senilai Rp. (8.927.448.721) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2024;
3. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp. 7.177.352.727,62 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024.



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

BAB VI

PENUTUP

Demikian secara ringkas pokok-pokok mengenai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024. Semoga Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

Nanga Bulik, Juni 2025

Pengguna Anggaran,

AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM., M.Si

NIP. 19750911 199803 1 008



L

A

M

P

I

R

A

N